

RENCANA KERJA TAHUN 2017

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT oleh karena atas berkah, rahmat, dan hidayahNya jualah sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai. Untuk itu perlu disusun Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai, semua pihak sangatlah diharapkan untuk penyempurnaan dimasa dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 ini. Semoga Allah, SWT memberikan balasan yang setimpal.

Sinjai, Desember 2016

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai



Andi Adeha Syamsuri AP, S. IP, M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19750105 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 LANDASAN HUKUM.....	3
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
I.4 SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA.....	6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD.....	9
II.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD.....	15
II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD..	26
II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.....	26
II.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	32

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	33
III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD.....	37
III.3 PROGRAM DAN KEGIATAN.....	39

BAB IV PENUTUP 46

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan berfungsi memberi arah bagi proses pembangunan jangka panjang dan jangka menengah juga sebagai dasar proses penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jangka pendek.

Rencana Kerja adalah Dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai Tahun 2017 memuat prioritas pembangunan rancangan kerangka ekonomi makro,

program-program sektoral, lintas sektoral dan lintas wilayah yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, yang tercermin dalam bentuk matriks kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai akan menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yaitu:

“ Tercapainya Iklim Investasi yang Kondusif dan Terdepan dalam Pelayanan Publik”.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan perannya, Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Iklim Investasi yang Nyaman bagi Dunia Usaha sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan pasti.

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan sumber daya aparatur yang professional, tegas, dan berkualitas.

Selain itu pula, untuk menjadi pedoman dan motivasi para Aparatur dalam memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat dan sebagai Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat, maka ditetapkan Maklumat Pelayanan yaitu “ ***PTSP siap melayani masyarakat dengan Ramah, Mudah, Cepat, Pasti, dan Transparan.***” Dan Motto Pelayanan adalah “ ***Bukan Janji Tapi Pasti***’.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah :

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
- b. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- f. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- g. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- l. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
- m. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- n. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksana Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
- p. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai;
- q. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

- r. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
- s. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);
- t. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- u. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan di bidang Penanaman modal sesuai dengan strategi, arah kebijakan, sasaran dan program pembangunan yang telah disepakati, sehingga seluruh upaya yang dilaksanakan bersifat sinergi, koordinatif dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah:

1. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih tajam;
2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai;
3. Mengarahkan semua Bidang menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran;
4. Merupakan komitmen terhadap program – program yang akan dilaksanakan.

I.4. SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA

Rencana Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2017, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018, perlu dilakukan review terhadap pelaksanaan kegiatan selama ini.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU (TAHUN 2015) DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai terbentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, yang sebelumnya adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Oleh karena itu, Evaluasi Rencana Kerja yang akan diuraikan pada Bab ini adalah Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Sinjai selama Tahun 2016.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pencapaian Renstra SKPD tahun 2015 sebagai berikut :

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2015
KABUPATEN SINJAI**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2014	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD 2016	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016		CATATAN	
1	2	3	4	5					6	7	8=7/6		9	10=5+7+9		11=10/4
1	1	2	1	5	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu											
1	1	2	1	5	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi	Jumlah Investasi yang dihasilkan	PMA/PMDN = 501	PMA/PMDN = 937	PMA/PMDN = 342	PMA/PMDN = 580	169,59	PMA/PMDN = 373	PMA/PMDN = 1890	506,70	Akumulasi dr pencapaian tahun sebelumnya (2014+2015) dengan Tahun berjalan	
1	1	2	1	5	Pengembangan Potensi Unggulan	Laporan hasil pengembangan potensi unggulan	2 laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100		2 Laporan	100		
1	1	2	1	5	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Validasi data penanaman modal	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60		
1	1	2	1	5	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	1 kali	1 Kali					1 Kali	100		
1	1	2	1	5	Penyelenggaraan pameran investasi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	45 Sektor/ 17 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	100	9 Sektor/ 3 event	27 sektor/9 event	52,9		
1	1	2	1	5	Temu Usaha Fasilitasi Kemitraan	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan	2 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100		2 Kali	100		
1	1	2	1	5	Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM	Penyelenggaraan Bimtek	3 kali/150org					1 Kali/50 org	1 Kali/50 org	33,3		

1	1	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 Bulan	60	
1	1	2	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	48 unit	5 unit	9 unit	9 unit	100	10 unit	24 Unit	50	
1	1	2	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 Bulan	60	
1	1	2	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bln	12 bln					12 Bulan	100	
1	1	2	1	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 Bulan	60	
1	1	2	1	1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 Bulan	60	
1	1	2	1	1	Pelayanan administrasi kesekretariatan	Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 Bulan	60	
1	1	2	1	2	Pengelolaan keuangan daerah	Waktu pengelolaan keuangan daerah	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 Bulan	60	
1	1	2	1	2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 Bulan	60	
1	1	2	2		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%								
1	1	2	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	4 unit								
1	1	2	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	7 unit	3 unit	2 unit	2 unit	100		5 Unit	71,4	
1	1	2	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	32 unit	8 unit	2 unit	2 unit	100	11 unit	21 Unit	65,6	
1	1	2	2	1	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	17 unit	3 unit	12 unit	12 unit	100		15 Unit	88,24	
1	1	2	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	5 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 Unit	60	
1	1	2	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	49 unit	9 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	29 Unit	59,18	
1	1	2	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	50 unit	-	10 unit	10 unit	100	10 unit	20 Unit	40	
1	1	2	2	2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	84 unit	-	20 unit	16 unit	80	20 unit	36 Unit	42,86	
1	1	2	2	4	Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung kantor	Jumlah gedung kator yang direhabilitasi	1 unit	1 unit					1 Unit	100	
1	1	2	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan	100%								

1	1 6	2	3	1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan	1 unit					1 unit	1 Unit	100		
1	1 6	2	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	95 orang	45 org				50 orang	95 Orang	100		
1	1 6	2	3	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan	98 orang		48 orang	48 orang	100		48 Orang	49,0		
1	1 6	2	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100%									
1	1 6	2	5	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	7 orang					3 orang	3 Orang	42,9		
1	1 6	2	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Waktu penyelenggaraan bimtek	60 bln	12 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	36 Bulan	60		
1	1 6	2	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	100%									
1	1 6	2	6	1	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Renstra dan Lakip yang disusun	4 laporan	1 laporan				1 laporan	2 Laporan	50		
1	1 6	2	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang disusun	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	60		
1	1 6	2	6		Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi keuangan yang dipelihara	1 paket	1 paket					1 Paket	100		
1	1 6	2	6	9	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	25 Dokumen		4 Dok	4 Dokumen	100	7 Dokumen	11 Dokumen	44		

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana bidang Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
3. pengkoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan lembaga Pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
5. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menerbitkan Ijin di Bidang Perdagangan
2. Menerbitkan Ijin di Bidang Pariwisata
3. Menerbitkan Ijin di Bidang Trayek
4. Menerbitkan Ijin di Bidang Jasa Konstruksi
5. Menerbitkan Ijin di Bidang Pembangunan
6. Menerbitkan Ijin di Bidang Penanaman Modal.

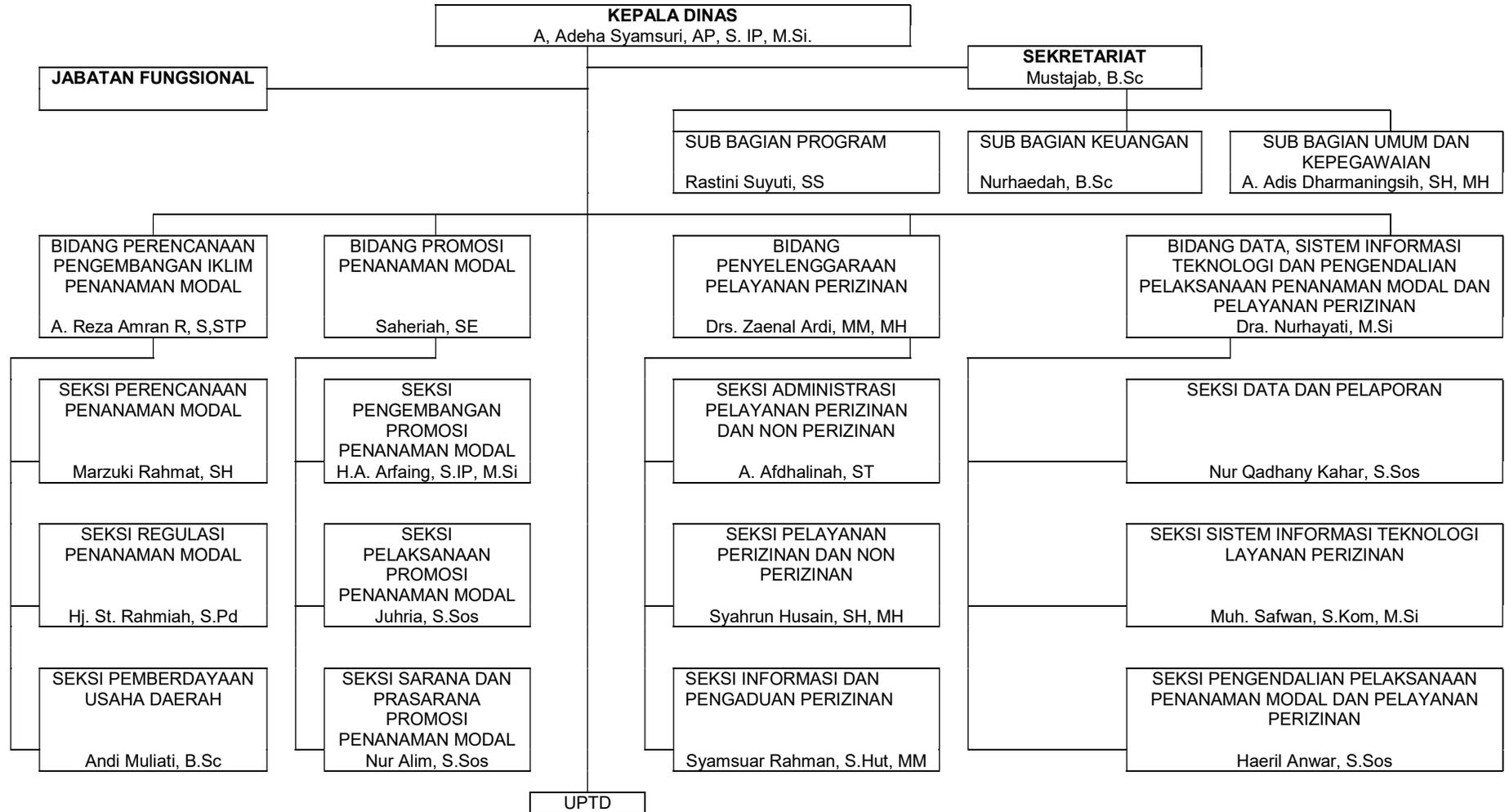
Adapun Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal:
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Regulasi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal:
 1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan:
 1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 3. Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan.

- f. Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan:
 - 1. Seksi Data dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- g. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI



Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Misi I : Meningkatkan Produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan Ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan

Tujuan 1 : Meningkatnya daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal sehingga dapat memberikan kontribusi pembangunan lokal.

Sasaran 1 : Meningkatnya daya saing investasi

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran tersebut adalah

Indikator 1 : Jumlah Investasi meningkat setiap tahunnya

Indikator 2 : Nilai Realisasi investasi meningkat tiap tahunnya

Misi III : Mewujudkan manajemen pemerintahan yang profesional, Kepemimpinan yang amanah dan Pelayanan Publik yang berkualitas.

Tujuan 1 : Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui Pembenahan Sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur birokrasi.

Sasaran 1 : Meningkatnya Tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu kepada sasaran tersebut adalah :

Indikator 1 : Jumlah Penyerahan Izin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah ditetapkan bahwa Indikator Kunci Keberhasilan untuk Bidang Penanaman Modal ditetapkan sebagai berikut :

- Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA)

- Jumlah Nilai Investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
- Rasio daya serap Tenaga Kerja
- Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

Untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD			REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2018	
				5	6	7	9	10	12	13
	Nilai Investasi PMDN dan PMA		Jumlah Investasi yang dihasilkan	PMA/PMDN = 332	PMA/PMDN = 342	PMA/PMDN = 373	PMA/PMDN = 937	PMA/PMDN = 580	PMA/PMDN = 501	
		Tersedianya Informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	Laporan hasil pengembangan potensi unggulan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Laporan hasil pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Terselenggaranya Pelayanan perijinan dan non perijinan bidang Penanaman Modal	Jumlah penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	1 Kali			1 Kali			
		Terselenggaranya Promosi peluang Penanaman Modal Kabupaten	Penyelenggaraan Pameran Investasi	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 3 event	9 Sektor/ 4 event	
		Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	Penyelenggaraan kegiatan temu usaha fasilitasi kemitraan	1 kali	1 kali		1 kali	1 kali	1 Kali/ 50 Orang	
			Penyelenggaraan Bimtek			1 Kali/50 org			1 Kali/50 org	
			Laporan hasil Monev pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai						1 Laporan	
	Nilai Investasi PMDN dan PMA		Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA	1.464.164.077.573	1.828.240.263.163	2.212.484.754.764	1.464.164.077.573	1.828.240.263.163	3.079.703.225.391	
		Terselenggaranya Pelayanan perijinan dan non perijinan bidang Penanaman Modal	Jumlah Rancangan Perda Penanaman Modal yang disusun			1 Ranperda				
			Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi						100 orang	

			Jumlah Dokumen RUPM yang disusun	1 dokumen			1 dokumen			
		Terimplementasikannya SPIPISE	Jumlah laporan pengelolaan SIPID, SPIPISE dan Website kantor	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		
			Updating Data SIPID dan SPIPISE			12 bulan			12 bulan	
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12 bulan						
		Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	Jumlah Laporan Fasilitasi Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal						1 Laporan	
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik		Jumlah Penyerahan Ijin	4000 ijin	4100 ijin	4200 ijin	4000 ijin	4100 ijin	4200 ijin	
		Terselenggaranya Pelayanan perijinan dan non perijinan bidang Penanaman Modal	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	1300 orang	1100 orang	1300 orang	1300 orang	1100 orang	1350 orang	
			Laporan hasil pembinaan pengelolaan layanan perijinan	1 laporan	1 Laporan		1 laporan	1 Laporan		
			Laporan hasil pengelolaan teknis layanan perijinan	1 laporan	1 Laporan		1 laporan	1 Laporan		
		Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Terselenggaranya Pelayanan perijinan dan non perijinan bidang Penanaman Modal	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP	1 laporan	1 Laporan		1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	
		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat Dunia Usaha	Penyelenggaraan Sosialisasi	225 orang	150 orang	150 orang	225 orang	150 orang	150 orang	
		Terselenggaranya Pelayanan perijinan dan non perijinan bidang Penanaman Modal	Jumlah aparat yang mengikuti peningkatan keterampilan dan profesionalisme pengelolaan perijinan	40 orang	45 orang		40 orang	45 orang	57 Orang	
			Jumlah Aplikasi PTSP yang diadakan	1 paket	1 paket		1 paket	1 paket	1 Paket	
			Jumlah Aplikasi yang dipelihara			1 paket			1 paket	

		Terselenggaranya sosialisasi kebijakan PM kepada masyarakat Dunia Usaha	Dokumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan Perijinan							
			Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bln						
			Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	9 unit	9 unit	10 unit	9 unit	9 unit	10 unit	
			Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln						
			Waktu penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bln			12 bln			
			Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bln						
			Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bln						
			Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	12 bln						
			Waktu pengelolaan keuangan daerah	12 bln						
			waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah	12 bln						
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah kendaraan dinas yang diadakan						5 unit	

			Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	3 unit	2 unit		3 unit	2 unit		
			Jumlah peralatan kantor yang diadakan	8 unit	2 unit	11 Unit	8 unit	2 unit	4 Unit	
			Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	3 unit	12 unit		3 unit	12 unit		
			Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	1 unit						
			Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	9 unit	10 unit	10 unit	9 unit	10 unit	10 unit	
			Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	-	10 unit	10 unit	-	10 unit	16 unit	
			Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	-	20 unit	20 unit	-	20 unit	22 unit	
			Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 unit			1 unit			
			Jumlah Instalasi Air/ Listrik yang diadakan			1 unit				
			Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah mesin/kartu absensi yang diadakan			1 unit				
			Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	45 org		50 orang	45 org			
			Jumlah pakaian khusus hari tertentu yang diadakan		48 orang			48 orang	50 orang	
			Persentase SDM aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal						2 orang	
			Waktu penyelenggaraan bimtek	12 bln						
			Jumlah laporan keuangan dan laporan kinerja SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

			Jumlah Renstra dan Lakip yang disusun	1 laporan		1 laporan	1 laporan		1 laporan	
			Jumlah laporan keuangan yang disusun	1 Laporan	2 Laporan					
			Jumlah aplikasi keuangan yang dipelihara	1 paket			1 paket			
			Jumlah dokumen perencanaan yang disusun		4 Dok	7 dok		4 Dok	7 dok	

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Ada beberapa Isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan investasi.
2. Belum kondusifnya Iklim Investasi khususnya dalam hal pelayanan perijinan.
3. Lahan bagi usaha industri berskala menengah/besar masih terbatas.
4. Sistem regulasi yang mengatur tentang kebijakan, fasilitas dan insentif bagi penanaman modal yang kurang menarik sehingga menyebabkan minat untuk berinvestasi semakin berkurang.
5. Pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan belum sepenuhnya berada dibawah PTSP.
6. Masih kurangnya penanam modal atau investor yang menjalin kemitraan dengan pelaku usaha kecil menengah (UKM), ini disebabkan karena sebagian besar produk-produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM masih belum sejalan dengan kebutuhan investor yang ada pada daerah itu.
7. Masalah jaminan kenyamanan dalam berinvestasi, hambatan ini lebih disebabkan oleh karena tidak terlaksananya secara maksimal sistem operasional prosedur (SOP) dalam proses pelayanan penanaman modal, masalah kenyamanan juga disebabkan karena sumber daya untuk pelayanan penanaman modal yang kurang memadai baik berupa sarana/prasarana dan sumber daya manusia penanaman modal.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Adapun Rancangan Awal terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017

KABUPATEN SINJAI

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	CATATAN PENTING			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	162	2												
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu													
1	1625	2	15	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi		Jumlah Investasi yang dihasilkan	PMA/PMDN = 388 Buah	267.940.000	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama investasi		Jumlah Investasi yang dihasilkan	PMA/PMDN = 388 Buah	224.934.000	
1	16258	2	158	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sinjai	Validasi data penanaman modal	1 Laporan	29.460.000	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sinjai	Validasi data penanaman modal	1 Laporan	39.545.000	
1	16250	2	150	Penyelenggaraan pameran investasi	Dalam dan Luar Propinsi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	9 Sektor/ 4 event	193.250.000	Penyelenggaraan pameran investasi	Dalam dan Luar Propinsi	Penyelenggaraan Pameran Investasi	3 Event	162.077.000	
1	16253	2	153	Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM	DPMP TSP	Penyelenggaraan Bimtek	1 Kali/50 org	21.230.000	Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM	DPMP TSP	Penyelenggaraan Bimtek	1 Kali	23.312.000	
1	1625	2	15	Monitoring, evaluasi pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	Laporan hasil Monev pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai	1 Laporan	24.000.000	Monitoring, evaluasi pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai	Kab. Sinjai	Laporan hasil Monev pelaksanaan CSR di Kabupaten Sinjai			Perlu dikaji lebih lanjut dalam pelaksanaan
1	16256	2	156	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA	2.628.749.620.665	100.310.000	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Jumlah Realisasi Investasi baik PMDN maupun PMA	2.628.749.620.665	71.745.000	

1	1 6	2	1 6	1 2	Updating sistem informasi penanaman modal di daerah	DPMP TSP	Updating Data SIPID dan SPIPISE	12 bulan	34.600.000	Updating sistem informasi penanaman modal di daerah	DPMP TSP	Updating Data SIPID dan SPIPISE	12 bulan	41.075.000	
1	1 6	2	1 6	9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPMP TSP	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12 bulan	35.710.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	DPMP TSP	Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12 bulan	30.670.000	
1	1 6	2	1 6		Fasilitasi Asosiasi di Bidang Penanaman Modal	DPMP TSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal	1 Laporan	30.000.000	Fasilitasi Asosiasi di Bidang Penanaman Modal	DPMP TSP	Jumlah Laporan Fasilitasi Asosiasi dengan Lembaga lain di bidang Penanaman Modal			Perlu dikaji lebih lanjut dalam pelaksanaan
1	1 6	2	1 8		Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik		Jumlah Penyerahan Ijin	4200 ijin	502.448.000	Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik		Jumlah Penyerahan Ijin	4200 ijin	499.142.000	
1	1 6	2	1 8	1	Penyelenggaraan PTSP	DPMP TSP	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	1350 orang	360.310.000	Penyelenggaraan PTSP	DPMP TSP	Jumlah Penanam Modal yang dilayani	1350 orang	373.545.000	
1	1 6	2	1 8	4	Layanan Pengaduan Masyarakat	DPMP TSP	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	29.615.000	Layanan Pengaduan Masyarakat	DPMP TSP	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	36.297.000	
1	1 6	2	1 8	5	Survey Kepuasan Pengelolaan Perijinan	DPMP TSP	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP	1 Laporan	72.523.000	Survey Kepuasan Pengelolaan Perijinan	DPMP TSP	laporan hasil survey IKM terhadap pengelolaan PTSP			Perlu dikaji lebih lanjut dalam pelaksanaan
1	1 6	2	1 8	6	Sosialisasi PTSP	DPMP TSP				Sosialisasi PTSP	DPMP TSP	Penyelenggaraan Sosialisasi PTSP	1 Kali	73.042.000	
1	1 6	2	1 8	0	Fasilitasi Kebijakan Pelayanan Perizinan	DPMP TSP	Dokumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan Perijinan	1 Laporan	40.000.000	Penyusunan Kebijakan di bidang Perijinan	DPMP TSP	Dokumen Regulasi Kebijakan di Bidang Pelayanan Perijinan	2 Perbup	16.258.000	
1	1 6	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	100%	489.420.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	100%	502.193.000	

1	1 6	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik	DPMP TSP	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bln	55.320.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik	DPMP TSP	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bln	74.520.000	
1	1 6	2	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	DPMP TSP	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	10 unit	2.200.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	DPMP TSP	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	9 unit	1.300.000	
1	1 6	2	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMP TSP	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	6.500.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	DPMP TSP	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	6.500.000	
1	1 6	2	1	1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	DPMP TSP	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bln	5.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan	DPMP TSP	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bln	5.000.000	
1	1 6	2	1	1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMP TSP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bln/2 koran	2.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DPMP TSP	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bln/2 koran	2.400.000	
1	1 6	2	1	1 9	Pelayanan administrasi kesekretariatan	DPMP TSP	Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	12 bln	168.000.000	Pelayanan administrasi kesekretariatan	DPMP TSP	Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	12 bln	157.665.000	
1	1 6	2	1	2 0	Pengelolaan keuangan SKPD	DPMP TSP	Waktu pengelolaan keuangan daerah	12 bln	70.000.000	Pengelolaan keuangan daerah	DPMP TSP	Waktu pengelolaan keuangan daerah	12 bln	63.177.000	
1	1 6	2	1	2 2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Propinsi	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bln	180.000.000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Dalam dan Luar Propinsi	waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 bln	191.631.000	

1	16	2	2		Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	128.500.000	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur		Cakupan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi	100%	212.000.000	
1	16	2	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DPMP TSP	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1 unit	20.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DPMP TSP	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan			
1	16	2	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	2 unit	5.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan	9 unit	86.000.000	AC dan Lemari
1	16	2	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah peralatan kantor yang diadakan	11 unit	13.900.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah peralatan kantor yang diadakan			
1	16	2	2	10	Pengadaan Mebeleur	DPMP TSP	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	2 unit	5.000.000	Pengadaan Mebeleur	DPMP TSP	Jumlah mebeleur kantor yang diadakan	11 unit	26.200.000	Meja Kerja dan Rak
1	16	2	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara secara rutin			Koordinasi dengan Dinas Perumahan
1	16	2	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMP TSP	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	10 unit	65.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DPMP TSP	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin	9 unit	42.500.000	
1	16	2	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	15 unit	3.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	10 unit	3.500.000	
1	16	2	2	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	22 unit	6.100.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah peralatan kerja yang dipelihara	20 unit	8.800.000	
1	16	2	2	30	Pengadaan Instalasi Listrik	DPMP TSP				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	DPMP TSP	Jumlah Instalasi Listrik Yang diadakan	1 Unit	45.000.000	
1	16	2	3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan	100%	28.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase PNS yang memenuhi standar kedisiplinan	100%	26.220.000	
1	16	2	3	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	DPMP TSP	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	50 orang	28.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	DPMP TSP	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	30 orang	13.800.000	
1	16	2	3	5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	DPMP TSP				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	DPMP TSP	Jumlah pakaian Pakaian Khusus	27 Orang	12.420.000	

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang pada tingkat kecamatan.

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**III.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL**

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pada agenda pembangunan nasional nomor 6 (enam), “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”, dengan sub agenda prioritas “Penguatan Investasi”. Sasaran yang hendak dicapai dalam rangka “Penguatan Investasi” untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2019.
4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu pertama adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis; dan kedua adalah peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

BKPM menerjemahkan dua pilar kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi BKPM, yaitu: pertama adalah menciptakan iklim

penanaman modal yang berdaya saing, dan kedua adalah meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Peran BKPM dalam melaksanakan agenda prioritas “Penguatan Investasi” disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan penanaman modal. Meskipun kebijakan ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pembina sektor namun BKPM dapat memberikan rekomendasi agar selaras dengan kebijakan umum penanaman modal yang ditetapkan dalam UU Nomor 25 tahun 2007.

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan, BKPM mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal.
7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
9. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BKPM bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal menjadi Rp 933 Triliun pada tahun 2019 dan kontribusi PMDN sebesar 38,9%.

Untuk sasaran yang lain akan menjadi tanggung jawab bersama Kementerian/Lembaga pembina sektor dan pemerintah daerah.

BKPM menerjemahkan dua pilar kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi BKPM, yaitu: pertama adalah menciptakan iklim penanaman modal yang berdaya saing, dan kedua adalah meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan. Kebijakan-kebijakan dalam pilar pertama ini ditujukan untuk meningkatkan penanaman modal secara umum melalui percepatan realisasi penanaman modal dari proyek "on the pipeline" melalui pemberian kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan meningkatkan kepastian hukum. Upaya untuk meningkatkan penanaman modal secara keseluruhan sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini diharapkan dapat membalikkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan penanaman modal yang saat ini terjadi.

Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
2. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan;
3. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah prioritas;
4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan untuk mengembangkan penanaman modal pada sektor prioritas, wilayah di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat serta mendukung kebijakan tertentu antara lain green investment dan transfer teknologi;

5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal (debottlenecking).

Arah kebijakan pilar kedua meningkatkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian, pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan. Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas;
 - a. Ketenagalistrikan dalam rangka mendukung ketahanan energi.
 - b. Industri padat karya
 - c. Industri pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah ekspor.
 - d. Industri kemaritiman
 - e. Industri substitusi impor bahan baku dan konsumsi untuk dalam negeri.
 - f. Industri pengolahan produk pertambangan untuk memberikan nilai tambah ekspor.
 - g. Industri pariwisata
2. Peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat
3. Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN
4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi

5. Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor infrastruktur, BKPM sesuai dengan perannya sebagai front office dan clearing house agent akan secara aktif memfasilitasi percepatan investasi dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dari tahap perencanaan hingga financial closing.
6. Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk kepentingan nasional yaitu meningkatkan PMA sektor prioritas, kerja sama penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama, serta melindungi dan mendorong penanaman modal Indonesia keluar (outward investment)
7. Meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan unit-unit kerja agar lebih efektif dan terintegrasi.

Arah kebijakan dan strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan langkah-langkah melalui program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam rumusan rencana jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya. Arah Kebijakan BKPM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
2. Mengikutsertakan aparat BKPM Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam berbagai pelatihan;
3. Mengimplementasikan SOP terhadap semua jenis operasional pelayanan perizinan;
4. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan;
5. Penyusunan peraturan gubernur tentang penanaman modal;
6. Pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif kepada calon investor;
7. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP);
8. Mengembangkan sistem informasi dalam penyediaan informasi potensi unggulan daerah;
9. Menyediakan informasi lahan potensial untuk tujuan investasi kepada calon investor;
10. Pembinaan terhadap pelaku usaha kecil menengah (UKM);

11. Melakukan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus, terarah dan inovatif;
12. Peningkatan kualitas penyelenggaraan promosi/pameran dalam dan luar negeri;
13. Menyiapkan sumber daya promosi yang handal;
14. Menghimpun data realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri serta menginventarisir gangguan dan hambatan dalam kegiatan penanaman modal;
15. Membentuk tim satuan tugas (*Task Force*) dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
16. Menjaga agar hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
17. Membuat buku business partner/mitra bisnis untuk jaringan investasi;
18. Memanfaatkan teknologi informasi (website) dalam penyebarluasan informasi peluang investasi;
19. Mengembangkan kerjasama regional Sulawesi (KAPET dan KEK) dan antar kawasan, antar negara dengan tetap membuka peluang bagi pengembangan kerjasama lainnya;

Selanjutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sinjai akan melakukan strategi pembangunan yang diuraikan sesuai dengan penjabaran misi pembangunan Kabupaten Sinjai, adalah:

Untuk melaksanakan misi-1 yakni “Meningkatkan produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur pedesaan dan perkotaan”, maka strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Penciptaan iklim investasi yang menarik dan mendorong penanaman modal asing ataupun penanaman modal dalam negeri bagi peningkatan daya saing daerah.

Untuk melaksanakan misi-3) yakni: “Mewujudkan manajemen pemerintahan yang professional, kepemimpinan yang professional dan

amanah serta pelayanan publik yang berkualitas”, maka strategi yang akan ditempuh adalah:

1. Peningkatan kualitas Sistem Pelayanan Publik sesuai Standar Pelayanan.

III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Sinjai bertugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah Kabupaten Sinjai , Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan. . Untuk itu, disusun visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2013 - 2018. VISI Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai adalah :

“ TERCAPAINYA IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DAN TERDEPAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tahun 2013 - 2018 Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan iklim investasi yang nyaman bagi dunia usaha sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan reformasi birokrasi melalui pelayanan publik yang mudah, cepat, transparan dan pasti.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dan sumber daya aparatur yang profesional, tegas, dan berkualitas.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tujuan

Rumusan Tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah :

1. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan keunggulan lokal sehingga dapat memberikan kontribusi pengembangan lokal.
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pembenahan sistem kelembagaan penatausahaan keuangan dan struktur birokrasi.

Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 adalah:

1. Meningkatnya Daya Saing Investasi.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Nilai Investasi PMA dan PMDN
- b) Jumlah investasi PMA dan PMDN

2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

- a) Jumlah Penyerahan Izin

III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sinjai, pada dasarnya kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai adalah Sejalan dengan Visi Kabupaten Sinjai tahun 2013 - 2018 yaitu “ **Terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, unggul dalam kualitas hidup, terdepan dalam pelayanan publik**”, dan sesuai dengan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2008 – 2013 yaitu “ **Tercapainya Iklim**

Investasi yang kondusif dan terdepan dalam pelayanan Publik”, maka Uraian Program beserta Kegiatan yang dirancang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017**

KODE REKENING	PROGRAM/ KEGIATAN	PRIORI TAS DAERA H	SASARAN PEMBANG UNAN DAERAH	LOKA SI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF	PRAKIRAA N MAJU 2018	JENI S PRO G & KEG 1/2/3	PERANGKAT DAERAH PENANGGUN GJAWAB
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN		HASIL KEGIATAN					
					TOLAK UKUR	TARGET	TOLAK UKUR	TARG ET	TOLAK UKUR	TARG ET				
1 1 6	2													DPMPTSP
1 1 6	2 1 5		Meningkat nya Dya Saing Investasi		Jumlah Investas i yang dihasilk an	PMA/PMDN = 388					224.934.00 0	285.000.00 0		
1 1 6	2 1 5	8	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Sinjai			Validasi data penanama n modal	1 Lapor an	Peningkatan nilai realisasi investasi	1 Lapora n	39.545.000	45.000.000	Seda ng Berja lan	
1 1 6	2 1 5	1 0	Penyelenggaraan pameran investasi	Dalam dan Luar Propin si			Penyeleng garaan Pameran Investasi	3 Event	Peningkatan penyebaran informasi potensi dan peluang usaha di kabupaten sinjai	3 Event	162.077.00 0	210.000.00 0	Seda ng Berja lan	
1 1 6	2 1 5	1 3	Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM	DPMP TSP			Penyeleng garaan Bimtek	1 Kali	Jumlah pengusaha yang menyetor LKPM	5 Pengu saha	23.312.000	30.000.000	Seda ng Berja lan	
1 1 6	2 1 6		Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		Jumlah Realisas i Investas i baik PMDN maupun PMA	2.628.749.62 0.665					71.745.000	63.000.000		
1 1 6	2 1 6	1 2	Updating sistem informasi penanaman modal di daerah	DPMP TSP			Updating Data SIPID dan SPIPISE	12 bulan	Data Informasi Penanaman Modal Daerah	1 lapora n	41.075.000	26.000.000	Seda ng Berja lan	

1	16	2	16	9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			DPMP TSP		Laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	12 bulan	Laporan Peningkatan Realisasi Investasi Penanaman Modal	1 laporan	30.670.000	37.000.000	Sedang Berjalan	
1	16	2	18		Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan publik	Optimalisasi Sistem Pelayanan Terpadu			Jumlah Penyerahan Ijin	4200 ijin				499.142.000	488.000.000		
1	16	2	18	1	Penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)			DPMP TSP		Penyelenggaraan PTSP	12 Bulan	Jumlah Penanam Modal Yang Terlayani dalam pengurusan Izin Usaha	1350 orang	373.545.000	385.000.000	Sedang Berjalan	
1	16	2	18	4	Layanan Pengaduan Masyarakat			DPMP TSP		Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Rekomendasi penyelesaian aduan masyarakat	100%	36.297.000	23.000.000	Sedang Berjalan	
1	16	2	18	6	Sosialisasi PTSP			DPMP TSP		Penyelenggaraan Sosialisasi PTSP	1 Kali	Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	100 Orang	73.042.000	37.000.000		
1	16	2	18	10	Fasilitasi Kebijakan Pelayanan Perizinan			DPMP TSP		Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	2 Peraturan Bupati	Peningkatan Regulasi di Bidang Perizinan	2 Peraturan Bupati	16.258.000	43.000.000	Sedang Berjalan	
1	16	2	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Cakupan layanan administrasi perkantoran yang terpenuhi (%)	100%				502.193.000	592.700.000		
1	16	2	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik			DPMP TSP		Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bln	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik, TV kabel	12 bln	74.520.000	80.000.000	Sedang Berjalan	

1	1 6	2	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional			DPMP TSP		Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perijinan	9 unit	Jumlah kendaraan dinas layak jalan	9 unit	1.300.000	2.200.000	Sedang Berjalan	
1	1 6	2	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor			DPMP TSP		Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bln	Terpeliharanya kebersihan kantor	1 unit Gedung Kantor	6.500.000	13.500.000	Sedang Berjalan	
1	1 6	2	1	1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan			DPMP TSP		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bln	Peningkatan kualitas layanan penerangan kantor	12 bln	5.000.000	5.000.000	Sedang Berjalan	
1	1 6	2	1	1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			DPMP TSP		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 bln/2 koran	Peningkatan layanan informasi kepada aparat	12 bln	2.400.000	3.000.000	Sedang Berjalan	
1	1 6	2	1	1 9	Penyediaan administrasi kesekretariatan			DPMP TSP		Waktu penyediaan administrasi kesekretariatan	12 bln	Kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran	12 bln	157.665.000	169.000.000	Sedang Berjalan	
1	1 6	2	1	2 0	Pengelolaan keuangan daerah			DPMP TSP		Waktu pengelolaan keuangan daerah	12 bln	Penyediaan laporan pertanggungjawaban keuangan bulanan	12 laporan	63.177.000	70.000.000	Sedang Berjalan	
1	1 6	2	1	2 2	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah			Dalam dan Luar Propinsi		waktu penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 bln	Sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	12 bln	191.631.000	250.000.000	Sedang Berjalan	

1	1	2	6	9	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD			DPMP TSP		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	8 dok	Dokumen SKPD Tahun Berjalan	8 dok	33.595.000	32.000.000	Sedang Berjalan
					Jumlah									1.630.160.000	1.623.700.000	

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai adalah Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan Tupoksi, Tujuan dan Sasaran pada Renstra 2013-2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2017 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rencana Kerja (RENJA) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.